

TESIS

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**YOHANES PAULUS ATARONA KADUS
No. Mhs.: 155202432/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

TESIS

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**YOHANES PAULUS ATARONA KADUS
No. Mhs.: 155202432/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : YOHANES PAULUS ATARONA KADUS
Nomor Mahasiswa : 155202432/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

6 Februari 2017

2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

27 Januari 2017



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : YOHANES PAULUS ATARONA KADUS
Nomor Mahasiswa : 155202432/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 21 Februari 2017.

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	
2. Anggota	: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	
3. Anggota	: Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi:

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.
PASCASARJANA

MOTTO

Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Hanya ide yang berakar ke bumi yang mungkin tumbuh dengan baik.

(Soe Hok Gie)

Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat.

(Soe Hok Gie)

Pada akhirnya aku berkeyakinan bahwa ketika Tuhan menempatkan aku di awal perjalanan ini, Dia jugalah yang akan menuntun aku hingga akhirnya. Aku tidak akan dibawa-Nya sejauh ini hanya untuk kegagalan.

(Sahabat Welfare UAJY 2011)

Bukalah mulutmu, berilah keputusan secara adil, dan berilah keadilan kepada yang tertindas dan miskin.

(Amsal 31: 9)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOHANES PAULUS ATARONA KADUS

Nomor Mahasiswa : 155202432/PS/MIH

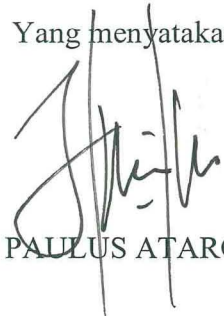
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, ~~2~~ Januari 2017

Yang menyatakan:



YOHANES PAULUS ATARONA KADUS

PERSEMBAHAN

**Tesis ini Penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta
Bapa Gregorius Kadus dan Mama Sofia Jeiya beserta kedua orang saudari
Kristiana Natalia Kadus dan Triwahyuni Adriana Kadus**



KATA PENGANTAR

Guna membentuk negara yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks ini adalah Perda tentang APBD pada era reformasi terasa meningkat seiring dengan situasi politik yang semakin terbuka dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Melalui gerakan reformasi tahun 1998, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berdemokrasi di Indonesia.

Sehubungan dengan pembentukan Perda tentang APBD, sudah seharusnya penyelenggaraan pembangunan di Daerah saat ini membuka seluas-luasnya forum partisipatif antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya. Semakin menguatnya kedudukan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Apalagi pada dasarnya, setiap kebijakan tentunya dibiayai oleh anggaran.

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang meliputi pendefinisian masalah, pemetaan masalah, dan penentuan kelompok sasaran harus diletakkan dalam konteks isi atau substansi sebagai pengukur kualitas kebijakan. Sebagai indikator pokok mekanisme kebijakan publik, rangkaian proses tersebut seharusnya menjadi poros kebijakan dan arah pembangunan di Daerah yang dimungkinkan dapat tercapainya partisipasi masyarakat. Segala hal yang dimasukkan dalam tahap penyusunan merupakan suatu proses lanjutan dari apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam

tahap perencanaan. Sebagai instrumen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tahap perencanaan juga seharusnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tesis ini ditulis dengan asumsi bahwa keberadaan negara adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Relasi negara dan masyarakat perlu dimaknai sebagai wujud nyata gerakan reformasi. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik, rakyat perlu dilibatkan. Dengan demikian, rakyat terus terlibat secara berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika rakyat pada rezim sebelumnya hanya dilihat sebagai obyek, maka momentum reformasi menjadikan rakyat sekaligus sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, bagi Penulis, Tesis dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dirasakan sangat menarik selain merupakan isu-isu faktual dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah belakangan ini. Dalam Tesis ini akan dibahas secara komprehensif mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hanya saja fokus penelitian ini kajiannya terbatas pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis ini kemudian

diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan akademik serta didedikasikan secara khusus untuk pengembangan Ilmu Hukum terutama dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I untuk semua rangkaian proses bimbingan dan arahan serta tukar pikiran yang sudah Penulis dapatkan, baik selama penulisan Tesis ini maupun sebelum penulisan Tesis ini berlangsung.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II untuk proses bimbingan dan arahan yang sudah Penulis dapatkan dan selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Narasumber dalam penelitian ini.
5. Bapak Pendi Pujo Bowo Leksono, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Narasumber dalam penelitian ini.

6. Bapak Danang Setiadi, S.IP., M.T., sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak Boedi Rheza dan Bapak Mohamad Yudha Prawira sebagai Staf Program dan Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) selaku Narasumber dalam penelitian ini.
8. Bapak Sunarja sebagai Direktur *Institute for Development and Economic Analysis* (Perkumpulan IDEA) selaku Narasumber dalam penelitian ini.
9. Bapak Supryono, S.IP., sebagai Staf Ahli Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Ayah dan Ibu Penulis: Bapa Gregorius Kadus, S.Pd. dan Mama Sofia Jeiya, S.Pd. yang telah banyak memberikan arti hidup, motivasi, dan dukungan, baik dalam bentuk materil, moril maupun spiritual bagi Penulis.
11. Kedua orang adik Penulis: Kristiana Natalia Kadus dan Triwahyuni Adriana Kadus untuk doa dan dukungan bagi Penulis.
12. Keluarga besar Penulis: Kakek Hilarius Jalu, P. Peter Aman, OFM., Pr., Rm. Kosmas, Pr., Om Feliks sekeluarga, Om Veni sekeluarga, Tanta Yos dan Tanta Pau sekeluarga, Om Tik sekeluarga, Kae Iky sekeluarga, Kae Stefanus Galar sekeluarga, Kae Stef Madun sekeluarga, Bapa Paul sekeluarga, Kae Teo Aben sekeluarga, Guru Mensi sekeluarga, Nene Edu sekeluarga, Kaka Rini Banggur sekeluarga, Weta Savrin, Enu Elsi, Keluarga Besar Golo Gega-Wodong, Keluarga

Besar Uwu untuk segala bentuk dukungannya, baik dalam bentuk materil, moril dan spiritual bagi Penulis.

13. Guru dan Karyawan SDK Langkas, Guru dan Karyawan SMP Seminari Pius XII Kisol, Guru dan Karyawan SMPK St. Fransiskus Saverius Ruteng, Guru dan Karyawan SMAK St. Fransiskus Saverius Ruteng, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berkontribusi dalam pengembangan akademik Penulis.
14. Kae Edward Wirawan, Kae Arman Suparman, Kesa Enesto Terredi, Kae Rikardus Acik, Kae Moris Kartono, Kae Sierra Letuna, Kae Rian Juru, Kae Arif Laga, dan Kae Rian Dagur yang telah banyak berdiskusi dengan Penulis dan untuk bimbingannya sampai saat ini.
15. Keluarga besar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak sempat Penulis sebutkan untuk kebersamaan dan dukungannya sampai saat ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis: Sugen Tabalubun, Wilibrodus Harum, Nicolaus Bela, Iron Wersun, Syufriyansyah, Anes Simarmata, Odhy Suarta Jaya, Enno Farlian, Hendrik Dano, Dionisius Egant, Glory Correira, Jufan Buba, Aldus Wae, Deny Bosco, Apri Lagur, Harpen Kares, Afri Ratu, Valentinus Arong, Dilo Jemagur, Rio Jempau, Alfred Nabal, Yuan Rajiman, Van Hami, Tino Slamet, Acik Ardiyansah, Epin Solanta, Krise Jerahun, Rifan Hamat, Yanto Ngger, Ririn Nabiada, Erin Tamatur, Osin Umar, Rista Goma, Hety Sujaya, Margareth, Meta

Rambung, Santy Jamu, Carolina Ijen, dan Deslin Tokan untuk kebersamaan dan dukungannya sampai saat ini.

17. Sahabat-sahabat FH UAJY 2011 yang tidak sempat Penulis sebutkan untuk kebersamaan dan dukungannya sampai saat ini.

18. Sahabat-sahabat Kos 18A: Bung Enno Farlian, Mba Rrmahayukd, Bung Arief Hidayat Gimbal, Bung Dhio, Bung Doyo, dan Bung Kevin untuk kebersamaan dan dukungannya sampai saat ini.

19. Keluarga besar JX-Com yang tidak sempat Penulis sebutkan untuk kebersamaan dan dukungannya sampai saat ini.

20. Semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan yang telah memberi dukungan, saran, dan masukan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi imbalan yang setimpal atas kebaikan hati dan kepedulian dari semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN SKEMA	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	18
A. Tinjauan Pustaka	18
1. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah	18
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21
3. Pemerintahan DIY	25
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY	28
B. Landasan Teori	31
1. Teori Ilmu Perundang-undangan	31
2. Teori Otonomi Daerah	33
3. Teori Partisipasi Masyarakat	37
BAB III: METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta	47
1. Konsep Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah	47
2. Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia	57

2.1.Prinsip-prinsip Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	57
2.2.Potret Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah	64
2.3.Potret Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	72
2.4.Potret Hubungan Pengawasan antara Pusat dan Daerah	80
3. Pemerintahan DIY	85
3.1.Sistem Rumah Tangga Daerah	85
3.2.Kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi	90
3.2.1. Kedudukan Gubernur	92
3.2.2. Kedudukan DPRD Provinsi	96
3.3.Desentralisasi Asimetris di Indonesia	100
3.4.Pemerintahan DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY	106
3.5.Pembiayaan Pemerintahan DIY	109
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY	121
4.1.Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY	121
4.2.Letak Partisipasi Masyarakat	146
B. Hambatan-hambatan dalam membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY	163
1. Manajemen Pemerintahan: Teknis Operasional Forum Partisipatif	166
2. Kebiasaan Lama: Mentalitas dan Perilaku Wakil Rakyat (DPRD)	171
3. Krisis Kesadaran dan Kompetensi Masyarakat	175
4. Kedudukan Stakeholder dan Kepentingannya	177
5. Praktek Kolusi Kelembagaan dan Kolusi Individu	180
6. Kerangka Legal Partisipasi Masyarakat	181
C. Upaya-upaya mengatasi Hambatan-hambatan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah APBD di DIY	182

1. Upaya Pembenahan di DIY saat ini	185
2. Upaya Pembenahan ke depannya (belum diterapkan di DIY)	195
BAB V: PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	206

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

	halaman
Tabel 1 : Tipologi Urusan Pemerintahan	71
Tabel 2 : Tipologi Desentralisasi Asimetris	106
Tabel 3 : Perbandingan Perda APBD dan Perda Umum	125
Tabel 4 : Proses Perencanaan dan Penganggaran	129
Tabel 5 : Model Perencanaan Berbasis <i>Performance Budgeting</i>	131
Tabel 6 : Pra Musrenbang	133
Tabel 7 : Musrenbang	133
Tabel 8 : Pasca Musrenbang	134
Tabel 9 : Penjabaran Tingkatan Musrenbang	134
Skema 1 : Alur Pelaksanaan Jasmas	137
Tabel 10 : Model Analisis Standar Belanja (ASB)	138
Skema 2 : Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	139
Tabel 11 : Sinergi Pusat dan Daerah	140
Skema 3 : Upaya Keselarasan (Nawacita, Prioritas, Sasaran)	140
Skema 4 : Upaya Keselarasan (RPJMN, Nawacita, Program Prioritas DIY)	141
Skema 5 : Sasaran RKP dan RKPD	141
Skema 6 : Struktur APBD	142
Tabel 12 : Penyusunan Rancangan APBD	142
Tabel 13 : Alur Perencanaan dan Penyusunan APBD	145
Skema 7 : Proses Penyusunan RPJDP, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD	145
Skema 8 : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	146
Tabel 14 : Peningkatan Interaksi dalam KP	157
Tabel 15 : Analisis <i>Stakeholder</i>	158
Tabel 16 : Tahapan <i>Public Surveys</i>	159
Tabel 17 : Alur Pelaksanaan Forum Pra Musrenbang	160
Skema 9 : <i>e-Musrenbang</i>	187
Skema 10 : Model <i>Jogja Plan</i>	188
Tabel 18 : Proses Penganggaran (<i>e-Budgeting</i>)	189
Tabel 19 : Rangkaian Proses <i>e-Musrenbang</i>	190
Tabel 20 : Substansi <i>e-Monev</i>	191
Skema 11 : Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi	191

DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASB	: Analisis Standar Belanja
Asmara	: Aspirasi Masyarakat
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPRD	: Badan Perwakilan Rakyat Daerah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPKA	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HSPK	: Harga Satuan Pokok Kegiatan
IDEA	: <i>Institute for Development and Economic Analysis</i>
Jasmas	: Jaring Aspirasi Masyarakat
KND	: Komite Nasional Daerah
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
LPPD	: Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPh	: Pajak Perseorangan
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPAPBD	: Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja	: Rencana Kerja
Renja-KL	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renstra-KL	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SSH	: Standar Satuan Harga
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu *Pertama*, bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY. *Kedua*, hambatan-hambatan apa yang dihadapi. *Ketiga*, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketiga persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta diperoleh dari bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif. Teori Perundang-undangan, Teori Otonomi Daerah, dan Teori Partisipasi Masyarakat digunakan untuk menganalisis penelitian.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah, APBD DIY.

ABSTRACT

This research entitled Public Participation in the Drafting of the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of the Special Area of Yogyakarta (DIY). There were three main problems discussed in the research. First, Public Participation in the Drafting the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of DIY. Second, the barriers on Public Participation during the Drafting of the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of DIY. Third, the efforts that had to be done to overcome the barriers on Public Participation Implementation in Drafting of the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of DIY. The objectives of this research were to find out and to analyze the three main problems stated.

This research is a normative research and it uses the law political approach, statute approach, and historical approach. The sources of the data are taken from secondary data which consists of primary law material and secondary law material. The data collecting methods are by doing a library research and interviews. The deductive way of thinking process is used to draw the conclusion. The statute theory, the autonomy regional theory, and the public participation theory is used as the analysis tool to study the research finding.

Key Words: Public Participation, the Drafting of the Local Regulations, the Local Budget (APBD) of DIY.